

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan Nomor 1 Lamongan - Kode Pos 62251 Telp. (0322) 321487 E-Mail : baghukum@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR: 188/60.4/KEP/413.013/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR: 188/47/
KEP/413.013/2019 TENTANG PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/ BERAT GEDUNG KANTOR DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang

: bahwa sehubungan dengan Sdr. Yoyok Kristantono, S.H., M.Si. yang ditunjuk selaku anggota Panitia Kegiatan Rehabilitasi Hasil Pekerjaan Pemeriksa Sedang/Berat Gedung Kantor di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 tugas, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, dipandang Keputusan Sekretaris mengubah 188/47/KEP/ nomor Kabupaten Lamongan Panitia Pemeriksa Hasil tentang 413.013/2019 Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, dalam Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 188/47/KEP/413.013/2019, pada romawi III, kolom 3 sehingga berbunyi Fadhin Muzamil, S.T., NIP.

19831116 201101 010, Penata (III/c).

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan, pada tanggal 6 Agustus 2019

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
- Sdr. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dimaksud.

Salman sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

<u>JOKÓ WÜRSIYANTO</u> IR. 198801 1 001